

POLITIK HUKUM PENDIDIKAN LIBERAL PADA MASYARAKAT ISLAM INDONESIA

Defi Tiara Amanda

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
devitiaraamanda@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai dua permasalahan terkait pendidikan kapitalistik dalam konteks Kapitalisme. Menjawab bagaimana konteks kapitalisme terjadi di kehidupan sehari-hari dan apa sebenarnya pendidikan liberal kapitalistik itu. Pada pembahasan awal terdapat kapitalisme puritanisme yang kemudian berubah menjadi 2 cabang gerakan berbeda yaitu rasional dan irasional. Dan dapat disimpulkan bahwa pendidikan Liberal sebagai bentuk gagasan untuk mendapat keuntungan secara finansial tanpa mempertimbangkan kepentingan siswa terhadap pendidikan.

Kata Kunci: *Politik hukum, Pendidikan liberal, Masyarakat Islam*

ABSTRACT

This Study aims to provide an understanding of two issues related to capitalistic education in the context of Capitalism. Answering how the context of capitalism occurs in everyday life and what exactly is capitalistic liberal education. In the initial discussion there was puritanism capitalism which later turned into 2 different branches of the movement, namely rational and irrational. And it can be concluded that Liberal education is a form of ideas to gain financially without considering the interests of students towards education.

Key Word: *Law political, Liberal Education, Islam Society*

A. PENDAHULUAN

Kebudayaan-kebudayaan yang muncul dari manusia sangat berpengaruh terhadap watak dan perilaku manusia, baik secara individu maupun kolektif. Menurut bukunya Meville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski yang dikutip Soeharjono Soekanto, kebudayaan (determinisme budaya) adalah segala sesuatu yang terdapat dalam suatu masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki masyarakat itu. Orang-orang yang menjadi anggota masyarakat terus berubah melalui kematian dan kelahiran, tetapi budaya bersifat super-organik karena mengikuti kebiasaan genetik dari generasi ke generasi.

Sejak lahir manusia sudah mempunyai naluri untuk hidup berkawan saling ketergantungan dan terikat bantuan satu sama lain sehingga manusia menyandang sebutan social animal Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai naluri yang disebut gregariousness ini merupakan sifat dasar manusia yang suka berteman.

Hal ini bisa saja disebabkan oleh diri manusia yang mempunyai hasrat seperti keinginan untuk membaur dengan teman di sekelilingnya dan keinginan untuk menyatu dengan alam sekelilingnya. Untuk dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan kedua lingkungan tersebut, seperti lingkungan alam dan lingkungan sosialnya manusia mempergunakan pikiran, perasaan secara emosional dan kehendak atau yang menjadi keinginannya. Akan tetapi selain itu manusia berusaha keras untuk merefleksikan diri sebagai salah satu bagian dari masyarakatnya.

Dalam pandangan menurut Islam, budaya biasa disebut *tsaqafat*, *hadarat* dan *madaniyah* (peradaban). Budaya atau peradaban dalam Islam mengandung dua makna yaitu ; Pertama, lawan kata dari primitif dan buas. Peradaban merupakan fase tertinggi dari fase-fase perkembangan manusia. Kedua, sekumpulan keistimewaan masyarakat, keagamaan, moralitas, teknik, ke-ilmuan, seni, yang terbesar dalam masyarakat tertentu, seperti peradaban India, Yunani, dan Arab.

Budaya biasa juga diartikan sebagai sejumlah fenomena bukti kemajuan ilmu pengetahuan, seni, moralitas yang turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu kelompok masyarakat yang memiliki kemiripan tersebut. Budaya beraneka ragam yang dapat dikelompokkan dalam beberapa istilah yaitu; budaya kuno, budaya modern, budaya Barat, budaya Timur.

Saat itu, kapitalisme adalah budaya dan ideologi masyarakat Barat. Sejak awal kemunculannya hingga saat ini, telah memberikan dampak yang sangat besar bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal ini aspek pendidikan. Sistem pendidikan yang didikte oleh kapitalisme adalah pendidikan liberal kapitalis yang bersifat sekuler dan hanya mengandalkan kekuatan keadaan. Kemajuan pengetahuan modern sebagai bentuk pemahaman libertarian sekuler dimotivasi oleh kekuatan metodologi dan eksperimentasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut bagaimana Politik hukum pemerintah sejak Belanda dalam penerapan pendidikan liberal kepada masyarakat Islam di Hindia Belanda/Nusantara yang dimunculkan fungsi konteks kapitalisme.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Sistem kapitalis ala Puritan tidak dipahami dengan baik. Kapitalisme yang mengutamakan nilai-nilai agama dalam etos kerjanya dan mengejar kebahagiaan duniawi, menjadi sekuler. Max Weber adalah kontributor besar untuk perubahan itu. Konsepsi Max Weber tentang gaya kapitalismenya ini berkembang hingga saat ini, terutama di negara-negara Eropa. Dan tanah Indonesia tidak dijual ke luar negeri, hanya dijual kepada bangsa Indonesia sendiri. Perubahan dari pertanian paksa menjadi perusahaan perkebunan swasta, meskipun perubahan ini tidak menguntungkan rakyat Indonesia karena kapitalis Belanda memaksa pekerja untuk membayar upah serendah mungkin.

Beberapa ciri konseptual liberalisme dalam pendidikan mendatang ditandai dengan munculnya positivisme sekuler terhadap pengetahuan ilmiah, aktivitas teknologi, peradaban material, hukum, etika pragmatis personal dan sains, serta agama dalam kehidupan.

C. METODE

Studi tentang Politik hukum pemerintah dalam penerapan pendidikan liberal kepada masyarakat Islam sejak Belanda di Hindia Belanda/Nusantara ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun teknik pencarian bahan adalah dengan teknik sekunder di mana sumber didasarkan pada literature kesejarahan dan literature sosio religi. Bahan yang diperoleh akan dikumpulkan dan direduksi atau dipilah, diolah dan dianalisis serta kemudian diinterpretasikan.

D. PEMBAHASAN

Politik hukum pemerintah Belanda dalam penerapan pendidikan liberal kepada masyarakat Islam dilakukan secara sistematis. Belanda tidak pernah menyerah, terus saja berusaha memporandakan pendidikan Islam dengan menyerang sistem perekonomiannya, yaitu daerah-daerah pesisir dan pelabuhan yang merupakan penggerak roda utama perekonomian produktif yang kebanyakan umat Islam melalui jalan perdagangan, dengan harapan bahwa apabila ekonominya lemah otomatis, akan mempengaruhi dan melemahkan pendidikannya, inilah pikiran kapitalisme yang selalu memandang bahwa segala sesuatu akan berjalan bila didukung oleh kapital atau ekonomi yang mapan, tetapi pikiran tersebut tidak dipandang serius dan juga tidak dibenarkan oleh umat islam terutama yang hidup di zaman Belanda tersebut.

Setelah upaya menghancurkan akar ekonomi masyarakat khususnya umat muslim. dirasakan kurang maksimal untuk mencegah lajunya pendidikan berbasis Islam di Indonesia, pemerintah Hindia Belanda menggunakan kekuatan politiknya dengan menekan kebijakan atau aturan khusus bagi penyenggaraan pendidikan Islam. Kebijakan- kebijakan melahirkan :

1. Pada tahun 1882, pemerintah Hindia Belanda membentuk badan khusus untuk mengawasi pembentukan dan pengamalan Islam di masyarakat. Laporan tahunan dihasilkan dari pemantauan ini. Pada tahun 1905, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang mewajibkan setiap orang yang terlibat dalam ajaran atau pengajian Islam untuk melaporkan kegiatannya kepada pemerintah Belanda.
2. Pada tahun 1925, mengeluarkan kebijakan yang lebih mengikat, seperti tidak semua Kiyai boleh memberikan pelajaran agama Islam, kecuali telah mendapat rekomendasi dari pemerintah Belanda. Hal ini dapat mengakibatkan hambatan pengajaran islam karena keterbatasan kyai. Yang hanya boleh mengatur dari rekomendasi pemerintah belanda saja.

Pemerintah Belanda terus saja melakukan aksi yang cukup serius dan mematikan seperti mempelajari ikhwal pribumi dan agama Islam dengan ilmu khusus yang disebut indologi untuk mencari celah kelemahan Islam. Ini adalah strategi untuk lebih menjatuhakn dan menghanguskan ajaran umat islam. Pengutusan Prof. DR. Cristian Snouck Hurgronje, sarjana sastra untuk belajar tentang Islam di Leiden dan Strasbourg, kemudian melanjutkan studinya ke Mekkah selama enam bulan, dan namanya diganti Abdul Gaffar. Setelah kembali dari Mekkah, ia dikirim untuk membantu menyelesaikan pemberontakan Santri di Aceh. Melalui kesempatan ini Snouck Hurgronje menyampaikan kepada pemerintah Hindia Belanda, agar mereka memperlihatkan sikap netral terhadap

semua agama di Indonesia sambil menggunakan jalur pendidikan untuk mengatasi fanatisme Islam secara berevolusi, dan pemerintah Belanda diharapkan mewaspadai masuknya Pan Islamisme yang sedang berkembang di Timur Tengah, dengan jalan menghalangi masuknya buku- buku atau brosur lain ke wilayah Indonesia, dan mengawasi kontak langsung dan tidak langsung antara tokoh-tokoh Islam Indonesia dengan tokoh-tokoh luar.

Pada masa penjajahan Belanda sistem pendidikan liberal kapitalistik tampaknya tidak mudah untuk diterapkan kepada bangsa Indonesia, terutama pada sistem pendidikan Islam yang telah mengakar lebih dahulu dibandingkan dengan kedatangan bangsa penjajah Belanda tersebut. Kemudian orang-orang Belanda menarik simpatik masyarakat Indonesia, setiap kebijakan yang mereka buat selalu merugikan bangsa Indonesia, sehingga hal tersebut menjadi sumber kemarahan dan kebencian mereka terhadap pemerintah Belanda. Dengan demikian apa yang dilakukan dan diprogramkan oleh Belanda selalu dinilai negatif, termasuk sistem pendidikan yang mereka selenggarakan, baik yang diperuntukkan kepada orang-orang belanda sendiri, maupun yang diperuntukan kepada bangsa indonesia.

Perubahan mendasar lain adalah menyangkut kepemilikan lembaga pendidikan, jika pesantren atau surau itu adalah dimiliki pendiri dan anak cucunya secara turun temurun, maka madrasah adalah milik organisasi, yayasan atau pemerintah yang sudah ditentukan sistem menejemennya. Tetapi kalau yang melakukannya adalah sekolah-sekolah di bawah naungan pemerintah, ini yang menjadi masalah yang serius.

Kementerian Pendidikan Nasional telah memilah sekolah menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), Rintisan SBI (RSBI), Sekolah Standar Nasional (SSN), dan Sekolah Reguler. Sebagai akibat diadakannya pemilahan sekolah-sekolah tersebut adalah lahirnya diskriminasi pendidikan bagi kelompok masyarakat miskin ini yang kemudian disebut kastanisasi pendidikan. Apabila stratifikasi pendidikan tersebut dikaitkan dengan masyarakat maka akan melahirkan kastanisasi pendidikan masyarakat sesuai dengan tingkat ekonominya. Kastanisasi pendidikan tersebut dapat diilustrasikan dalam empat tingkatan sebagai berikut: Kelompok A, SBI diisi oleh kumpulan anak-anak orang kaya dan pintar; Kelompok B, RSBI diisi oleh kumpulan anak-anak orang kaya tapi bodoh; Kelompok C, SSN, diisi oleh anak-anak pintar tapi miskin; dan Kelompok D, Sekolah Reguler, diisi oleh anak-anak yang tidak memiliki pilihan lain tetapi mereka mau sekolah juga. Untuk masuk di SBI dibutuhkan biaya pendaftaran antara enam sampai delapan juta rupiah tentu biaya ini dapat ditempuh oleh orang-orang kaya sedangkan orang miskin tidak. dengan biaya perbulannya antara 400-500ribu rupiah. dana tersebut mendapat tambahan berupa subsidi pemerintah selama 3 Tahun antara 620-720 juta Sebuah harga yang sangat fantastis yang menunjukkan adanya anak emas pemerintah terhadap lembaga-lembaga pendidikan milik negara.

Peristiwa fakta lain mengenai pendidikan kapitalistik di atas telah menghilangkan visi dan misi pendidikan nasional yang sebelumnya sudah di sepakati oleh karena itu menuai kritikan dari seorang ahli pendidikan, yang bernama Syarief (1997) sebagaimana dikutip oleh Muhyi Batubara, ia mengatakan;

bahwa perlu mempertahankan visi dan misi sistem pendidikan nasional dengan langkah-langkah strategis seperti;

1. Menciptakan sistem pendidikan fleksibel.
2. Menanamkan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sejak dini, mulai pada tingkat dasar dalam rangka menumbuh- kembangkan budaya iptek.
3. Menumbuhkembangkan daya juang (fighting spirit), profesionalisme, dan wawasan keunggulan.
4. Menumbuhkembangkan sikap hidup yang hemat, cermat, teliti, tertib, tekun, dan disiplin.
5. Menumbuhkembangkan moral dan budipekerti luhur sebagai peng-
ejawantahan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang maha esa.

Dimensi pendidikan yang disebutkan di atas sangat terlihat positif namun demikian dalam praktek penyelenggaraan pendidikan di lapangan kadanPendidikan dari negara adalah hal yang tidak dapat dihilangkan, karna Pendidikan merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dan tidak pernah ada tanpa adanya dukungan dari negara, begitupun sebaliknya, negara tidak akan pernah mencetaj generasi emas yang cerdas apabila pendidikannya tak dibina dengan cemerlang. Salah satu fungsi pendidikan adalah untuk mengokohkan sistem negara yang ada. Karena dengan pendidikan lahirlah sumber pengetahuan yang dapat menunjang bangkitnya suatu negara itu sendiri baik dari segi politik, sosial maupun ekonomi. Berbeda hal jika negaranya sekuler, sistem pendidikannya pastilah dirancang untuk mengokohkan sekularisme itu sendiri, dan Ironisnya, Indonesia meski mayoritas penduduknya beragama Islam, memilih sistem negara yang sekuler yang memiliki kurikulum sesuai dengan karakteristik sekularisme itu sendiri.

E. KESIMPULAN

Di bidang pekerjaan kerakyatan, harus tersedia baik bagi pekerja legal maupun pekerja yang menjual jasanya karena kebutuhan, bisa juga melalui komersialisasi kehidupan ekonomi, yaitu. penggunaan umum tempat komersial dalam bentuk hak saham perusahaan. . Kapitalisme yang mengutamakan nilai-nilai agama dalam etos kerja dan memperjuangkan kesejahteraan dunia, kemudian menjadi sekuler. Sementara itu, kapitalisme irasional adalah bentuk kapitalisme politik yang dipandang menggali kekayaan materi yang ada daripada menanamnya untuk menambah kekayaan. Kapitalisme masuk ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda tak lama setelah kaum liberal Belanda memenangkan parlemen, diikuti dengan liberalisasi di wilayah jajahan Hindia Belanda. Sebagai akibat dari segregasi sekolah, muncul diskriminasi pendidikan bagi kelompok penduduk miskin tersebut, yang kemudian disebut sebagai kasta pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

An Nahlawi, Abdurrahman, (1996), *Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyah fi al-Bait, wa al- Madrasah wa al-Mujtama'*, diterjemah oleh Sahibuddin dengan judul *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, cet. II, Jakarta: Gema Insani Press.

- Andreski, Stanislav, (1989), *Max Weber on Capitalism, Bureaucracy, and Religion*, diterjemah oleh Hartono dengan judul *Max Weber: Kapitalisme, Birokrasi, dan Agama*, cet. I, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Azra, Azyumardi, (1999), *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Az-Zuhaili, Wahba, (2002), *al-Qur'an al-Karim: Binyatuhu al-Tasyri'iyah wa Khashāisuhu*, diterjemah oleh Syarif Hade Masyah dan Ali Efendi Anshori dengan judul *Al Qur'an Menjawab Tantangan Zaman*, cet. I, Jakarta Selatan: Mustaqim.
- Batubara, Muhyi, (2004), *Sosiologi Pendidikan*, cet. I, Jakarta: Ciputat Press.
- Capra, Pritjof, (2000), *The Turning Point* diterjemah oleh M. Toyibi dengan judul *Titik Balik Peradaban*, cet. V, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Kompas (2010), Kastanisasi Pendidikan. “[Berita]. *Kompas*, No. 301, 7 Mei 2010.
- Latif, Yudi, (2005), *Intelegensia Muslim dan Kuasa*, cet. I, Bandung: Mizan.